



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMMAD ISMAIL AINI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **861158**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.479.459.200**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 390 m2/131 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, WARISAN Rp. 418.392.200
2. Tanah dan Bangunan Seluas 803 m2/114 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 2.470.575.000
3. Tanah Seluas 288 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 842.400.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 305 m2/60 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, WARISAN Rp. 585.636.000
5. Tanah Seluas 345 m2 di KAB / KOTA NGAWI, WARISAN Rp. 13.716.000
6. Tanah Seluas 445 m2 di KAB / KOTA NGAWI, WARISAN Rp. 8.900.000
7. Tanah Seluas 1816 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 116.224.000
8. Tanah Seluas 288 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 23.616.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **553.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI OUTLANDER SPORT 2.0 L PXE AT Tahun 2015, LAINNYA Rp. 201.000.000



2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L DAKAR (4X2) 8 A/T
Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 352.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	41.908.766
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.078.867.966
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.078.867.966

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.